INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Instansi : KECAMATAN PASIRIAN

Tugas : Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

Fungsi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
g. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan;
h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. Melaksnakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
j. Melkasanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator tujuan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\textit{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\textit{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} x\ 100\%$	Seluruh Kasi	Seluruh Pejabat Struktural
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\textit{Jumlah desa yang meyusun RKPDesa tepat waktu} + \textit{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \textit{Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu}}{\textit{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa}}$	Seluruh Kasi	Seluruh Pejabat Struktural

CAMAT PASIRIAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran :

a. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
   Indikator : Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti
   Formulasi :

$$\frac{\textbf{\textit{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}}{\textbf{\textit{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}}} \textbf{\textit{x}}\ \mathbf{100\%}$$

Penjelasan :
Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan.

1. JENIS FASILITASI :

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*4*	*3*	*5*
1.	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa; 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes; 3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan	1. Perdes Kewenangan Desa; 2. Perdes RPJMDes; 3. Perdes Perubahan RPJMDes;	1. Rapat koordinasi 2. Dokumen/Laporan, 3. SK Camat, 4. Rekomendasi, 5. Berita Acara hasil Fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*4*	*3*	*5*
		RPJMDes; 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes; 5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes; 6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes; 7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes; 8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa; 9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD; 10. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD; 11. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	4. Perdes RKPDes; 5. Perdes Perubahan RKPDes; 6. Raperdes APBDes; 7. Raperdes Perubahan APBDes; 8. Perdes SOTK Desa; 9. Perdes TKD; 10. Perdes LKD; 11. Perdes BUMDes	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*4*	*3*	*5*
		12. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes	12. Perdes Penyertaan modal BUMDes	
2.	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa; 2. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk; 3. Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan; 4. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	1. Administrasi Umum; a. Data Perangkat Desa b. Buku Perdes c. Buku SK 2. Administrasi Penduduk; a. Buku IndukPenduduk b. Buku Mutasi Penduduk 3. Administrasi Keuangan; a. Buku APBDes b. Buku RAB 4. Administrasi Pembangunan; a. Buku	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*4*	*3*	*5*
		5. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	Kegiatan Pembangunan 5. Administrasi Lainnya. a. Buku Administrasi BPD b. Buku Administrasi LPMD	
3.	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	1. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes) 2. Fasilitasi Pembinaan PelaksanaanKeuangan Desa (DPA & RAK) 3. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 4. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan	1. Terlaksananya pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes) 2. Terlaksananya pembinaan Keuangan Desa (DPA & RAK) 3. Terlaksananya pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 4. Terlaksananya pembinaan Pelaporan	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*4*	*3*	*5*
		Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun) 5. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun) 5. Terlaksananya pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	
4.	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	
5.	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa yang terlaksana	
6.	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades	Pembentukan Panitia Pilkades dan tersedianya Berkas adminsitrasi Pilkades : BA Panwascam	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*4*	*3*	*5*
7.	Fasilitasi pelaksanaantugas dan fungsi Badan PermusyawaratanDesa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD yang terlaksana	
8.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	1. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes; 2. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes; 3. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam 4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes 5. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RPJMDes	1. BA Musdes yang tersedia 2. BA Musrenbangdes yang tersedia 3. BA Musrenbangcam yang tersedia 4. Dokumen RPJMDes yang tersedia 5. Dokumen Perubahan RPJMDes yang tersedia	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*4*	*3*	*5*
		6. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes 7. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	6. Dokumen RKPDes yang tersedia 7. Dokumen Perubahan RKPDes yang tersedia	
9.	Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan	Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa	Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desayang terlaksana (surat undangan sosialisasi)	
10.	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Pembinaan LINMAS 2. Pembinaan SKD 3. Monev Trantibum	2. LINMAS terbina 3. SKD terbina 4. Monev Trantibum terlaksana	
11.	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	
12.	Fasilitasi penyusunan	1. Fasilitasi Musdes yang partisipatif;	1. Daftar Hadir Musdes yang	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*4*	*3*	*5*
	perencanaan pembangunan partisipatif		tersedia;	
		2. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;	2. Daftar Hadir Musrenbangdes yang tersedia;	
		3. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	3. Daftar Hadir Musrenbangcam yang tersedia;	
		4. Fasilitasi Penyusunan RPJMDes yang partisipatif	4. Daftar Hadir Penyusunan RPJMDes	
		5. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDesyang partisipatif;	5. Daftar Hadir Penyusunan Perubahan RPJMDes	
		6. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	6. Daftar Hadir Penyusunan RKPDes	
		7. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	7. Daftar Hadir Penyusunan Perubahan RKPDes	
13.	Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan	Pembinaan BKAD	Laporan Pembinaan BKAD yang	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*4*	*3*	*5*
	kerjasama Desa dengan pihak ketiga		tersedia	
14.	Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa	Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa)	Laporan Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa) yang tersedia	
15.	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	1. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes; 2. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam 3. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes	1. BA Musrenbangdes yang tersedia 2. BA Musrenbangcam yang tersedia 3. Dokumen RPJMDes yang tersedia	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*4*	*3*	*5*
		4. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDesa 5. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes 6. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	4. Perubahan RPJMDes 5. RKPDes 6. Perubahan RKPDes	
16	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	1. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian 2. Fasilitasi SosialisasiPelayanan Publik	1. Santunan Kematian yang tersalurkan 2. Sosialisasi Pelayanan Publik yang terlaksana	
17	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	1. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	2. Laporan Pengelolaan Administrasi Umum dan	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*4*	*3*	*5*
			Kepegawaian yang tersedia	
18	Fasilitasi Keuangan	1. Fasiltasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja 2. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3. Fasilitasi penyusunan LaporanKeuangan 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1. Laporan Perencanaan dan Kinerja yang tersedia 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia 3. Laporan Keuangan yang tersedia 4. Laporan Pertanggungja waban Keuangan yang tersedia	

2. JENIS KOORDINASI :

NO.	JENIS KOORDINASI	URAIAN KOORDINASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan	Koordinasi Pendampingan Desa	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan seluruh Pendamping	
2.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	Daftar Usulan RKPDes yang tersedia	

3. JENIS REKOMENDASI :

NO.	JENIS REKOMENDASI	URAIAN REKOMENDASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang diterbitkan	

b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

Formulasi :

$$\frac{(\textbf{Jumlah desa yang meyusun RKPDesa tepat waktu} + \textbf{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \textbf{Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu}}{\textbf{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan } x \textbf{ 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa}} \; x \; \mathbf{100}\%$$

Penjelasan :

- Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.
  1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
  2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
  3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.